Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026 – 132-144
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056

e-ISSN: 2622-6421
ISSN: 2088-9607

Accounting Compliance in Public Financial Governance with Direct and Moderating Roles of Internal Audit

Sri Mauliza[1], Muhammad Yunus[2*], Anggi Afnisah[3], Khairul Amri Hasibuan[4]
[1] Universitas Al Washliyah Medan, Jl. Sisingamangaraja, Kota Medan.
[1] Program Studi Akuntansi, Universitas Al Washliyah Medan, Kota Medan.
[2*] Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Jl. Sriwijaya No. 9, Kota Pematangsiantar.
[2*] Program Studi Akuntansi, Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar.
[3,4] STIE Graha Kirana, Jl. Gajah Mada, Kota Medan.
[3,4] Program Studi Akuntansi, STIE Graha Kirana, Kota Medan.
e-mail: [1]srimauliza@univamedan.ac.id, [2*]m.yunus4994@gmail.com,
[3]anggiafnisah@graha-kirana.com, [4]khairulamrihasibuan@graha-kirana.com

Dikirim: ***03-07-2026*** | *Diterima:* ***29-09-2026*** | *Diterbitkan:* ***31-10-2026***

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *Public Financial Governance* serta peran langsung dan moderasi audit internal pada pemerintah daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan formal dan pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Indonesia. Data diperoleh dari 93 responden yang berasal dari 31 organisasi perangkat daerah dan dianalisis menggunakan *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Financial Governance*. Audit internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Financial Governance* serta secara signifikan memperkuat pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *Public Financial Governance*. Nilai *R-square* sebesar 0,458 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 45,8% variasi *Public Financial Governance*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi yang didukung oleh audit internal yang efektif berperan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai peran audit internal yang berpengaruh langsung terhadap *Public Financial Governance* sekaligus memperkuat pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *Public Financial Governance*.

Kata kunci: ketaatan aturan akuntansi; audit internal; *public financial governance*; akuntansi sektor publik

Abstract

This study examines the effect of compliance with accounting standards on public financial governance, as well as the direct and moderating roles of internal audit in local governments. This study was motivated by the persistent gap between formal regulations and their implementation in local financial management. The study employs a quantitative approach with an explanatory design and was conducted in South Tapanuli Regency, Indonesia. Data were collected from 93 respondents from 31 local government agencies and analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of the study indicate that compliance with accounting standards has a positive and significant effect on public financial governance. Internal audit also has a positive and significant effect on public financial governance and significantly strengthens the effect of compliance with accounting standards on public financial governance. An R-squared value of 0.458 indicates that the model explains

2622-6421
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056

45.8% of the variation in public financial governance. The study's findings show that compliance with accounting standards, supported by effective internal audits, plays a role in strengthening local financial governance. This study provides empirical evidence regarding the role of internal audits, which have a direct impact on public financial governance, while also reinforcing the influence of compliance with accounting standards on public financial governance.

Keywords: *accounting compliance; internal audit; public financial governance; public sector accounting*

1. PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan publik merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya publik (Rashied et al., 2024). Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab (Pattawe et al., 2022), pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik (Zaitul et al., 2023). *Public financial governance* menjadi kerangka penting yang merepresentasikan bagaimana mekanisme, prosedur, dan pengawasan keuangan publik dijalankan secara institusional di tingkat pemerintah daerah.

Salah satu isu yang umumnya muncul dalam pengelolaan keuangan daerah adalah rendahnya tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi (Mendez & Bachtler, 2024). Meskipun standar dan pedoman akuntansi sektor publik telah ditetapkan secara nasional, penerapannya di tingkat pemerintah daerah tidak selalu berjalan secara konsisten (Adekunle et al., 2023). Ketaatan akuntansi umumnya hanya dipandang sebatas kewajiban administratif, sehingga fokus utama lebih diarahkan pada pemenuhan formalitas pelaporan daripada pada substansi akuntabilitas keuangan. Kondisi ini berpotensi melemahkan *public financial governance* karena informasi keuangan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan yang andal.

Selain ketaatan akuntansi, peran audit internal memiliki posisi strategis dalam memperkuat *public financial governance* (Nadirsyah et al., 2024; Su et al., 2023). Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan proses pengelolaan keuangan (Al-Taee & Al-Fandawi, 2023). Melalui fungsi evaluatif dan konsultatifnya, audit internal berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan (Gyimah et al., 2024), meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, efektivitas peran audit internal tentu akan bergantung pada tingkat independensi, kompetensi aparat pengawasan, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, fenomena yang umumnya ditemukan adalah adanya kesenjangan antara ketentuan formal pengelolaan keuangan dan implementasinya di tingkat daerah (Sawir et al., 2025). Meskipun regulasi akuntansi dan sistem pengendalian telah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur pencatatan dan pelaporan (Nurfaidah & Novita, 2022), inkonsistensi penerapan standar akuntansi (Gonçalves et al., 2022), serta lemahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan internal (Sari & Darmastuti, 2023). Audit internal yang seharusnya berperan sebagai mekanisme penguatan tata kelola terkadang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena posisinya yang belum sepenuhnya strategis dalam struktur organisasi (Yousif & Mohamed, 2022). Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan daerah cenderung berorientasi pada pemenuhan administratif, sementara aspek penguatan tata kelola keuangan publik secara substantif masih belum menjadi perhatian utama. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa *public financial governance* di tingkat pemerintah daerah masih memerlukan penguatan (Uyar et al., 2022), khususnya melalui peningkatan ketaatan terhadap aturan akuntansi dan optimalisasi peran audit internal. Kondisi tersebut juga tercermin pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil pemeriksaan kepatuhan BPK RI atas pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 mencatat 12 permasalahan senilai

Rp2,268 miliar, selain itu pemeriksaan atas kepatuhan belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2025 juga menemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kekurangan volume dan mutu pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,729 miliar serta belum dikenakannya sanksi denda keterlambatan atas 11 paket pekerjaan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp86,67 juta (BPK RI, 2025; BPK RI, 2026). Temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan pentingnya penguatan kepatuhan dan pengawasan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran ketaatan aturan akuntansi dan audit internal dalam *public financial governance* pada pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman empiris mengenai sejauh mana kepatuhan terhadap aturan akuntansi berkontribusi terhadap tata kelola keuangan publik, serta bagaimana peran audit internal dapat memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme tata kelola keuangan publik, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik dan administrasi pemerintahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. *Public Financial Governance*

Public financial governance merujuk pada mekanisme tata kelola pengelolaan keuangan publik yang dijalankan oleh institusi pemerintah dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengawasan (Adekoya, 2023). *Public financial governance* dipandang sebagai kerangka institusional yang mengatur bagaimana sumber daya publik direncanakan, digunakan, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan (Barngetuny, 2024). Fokus utama konsep ini tidak hanya terletak pada hasil pengelolaan keuangan, melainkan pada proses, mekanisme, dan sistem pengendalian yang mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah (Amalia, 2023).

Sejumlah studi menekankan bahwa tata kelola keuangan publik yang kuat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan formal (Batkunde & Dewi, 2022; Efunniyi et al., 2024; Teresia & Tirsa, 2023) dan keberadaan mekanisme pengawasan internal yang efektif (Al-Taee & Al-Fandawi, 2023; Oppong et al., 2023; Zouari-Hadiji & Mroua, 2026). Namun demikian, praktik *public financial governance* masih memperlihatkan variasi implementasi antar organisasi pemerintah, terutama pada level pemerintah daerah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi serta sistem formal belum secara otomatis menjamin terwujudnya tata kelola keuangan publik yang efektif, sehingga diperlukan kajian empiris yang komprehensif untuk mengidentifikasi determinan yang memengaruhinya.

2.2. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik (Yasis, 2024). Ketaatan akuntansi mencerminkan sejauh mana entitas pemerintah menerapkan standar akuntansi dan ketentuan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan secara normatif (Simon et al., 2024). Pada pemerintah daerah, kepatuhan terhadap aturan akuntansi berperan penting dalam menjamin konsistensi, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan yang dihasilkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan akuntansi yang tinggi berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik (Dimitrov, 2024). Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap aturan akuntansi cenderung dikaitkan dengan rendahnya kualitas informasi keuangan, lemahnya pengendalian internal, serta meningkatnya risiko kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, beberapa studi juga mencatat bahwa kepatuhan akuntansi di sektor publik cenderung bersifat formalistik (Kabwe, 2023), yaitu berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif tanpa diiringi pemahaman substantif terhadap tujuan akuntabilitas keuangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketaatan akuntansi memiliki potensi besar dalam membentuk tata kelola keuangan publik (Muslimah et al., 2023), tetapi

2622-6421
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056

efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana kepatuhan tersebut dijalankan dan diawasi dalam praktik organisasi pemerintah.

2.3. Peran Audit Internal

Audit internal merupakan komponen penting dalam sistem pengawasan sektor publik yang berfungsi untuk memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian internal (Shuwaili et al., 2023), kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan proses pengelolaan keuangan. Dalam literatur akuntansi sektor publik, audit internal diposisikan sebagai mekanisme yang menjembatani antara regulasi formal dan praktik pengelolaan keuangan di tingkat operasional.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa peran audit internal di pemerintah daerah tidak selalu berjalan optimal (Mukoffi et al., 2023). Keterbatasan independensi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan cenderung menjadi faktor penghambat efektivitas audit internal dalam memperkuat tata kelola keuangan publik. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya perdebatan dalam literatur mengenai sejauh mana audit internal mampu berkontribusi secara nyata terhadap penguatan *public financial governance*, khususnya dalam pemerintah daerah yang memiliki karakteristik kelembagaan yang beragam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan penjelasan empiris mengenai keterkaitan antarvariabel melalui pengujian statistik terhadap data yang diperoleh dari responden penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *public financial governance*, yang merepresentasikan mekanisme tata kelola pengelolaan keuangan publik di lingkungan pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan adalah ketaatan terhadap aturan akuntansi, yang mencerminkan tingkat kepatuhan aparatur dalam menerapkan standar dan ketentuan akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, peran audit internal juga diuji pengaruh langsungnya terhadap *public financial governance* sekaligus ditempatkan sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *public financial governance*.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Indikator

Variable	*Code*	*Indicator*	*Standard Reference*
Public Financial Governance	PFG1	- *Transparency in public financial management*	OECD (2023); IFAC (2023)
	PFG2	- *Accountability in financial management and reporting*	OECD (2023)
	PFG3	- *Compliance with public financial regulations*	INTOSAI (2019)
	PFG4	- *Effectiveness of financial oversight mechanisms*	IFAC (2023); INTOSAI (2019)
	PFG5	- *Integrity of financial administrative processes*	OECD (2024)
Accounting Compliance	AC1	- *Application of public sector accounting standards*	IPSASB (2024)
	AC2	- *Consistency in transaction recognition and measurement*	IPSASB (2024)
	AC3	- *Compliance with financial reporting procedures*	IPSASB (2024)
	AC4	- *Timeliness of public financial reporting*	OECD (2023)
Internal Audit	IA1	- *Independence of the internal audit function*	IIA (2024)
	IA2	- *Competence and professionalism of internal auditors*	IIA (2024)
	IA3	- *Scope and effectiveness of internal oversight*	INTOSAI (2019); IFAC (2023)
	IA4	- *Follow-up on internal audit recommendations*	IIA (2024)

Sumber: OECD (2023); OECD (2024); IFAC (2023); INTOSAI (2019); IPSASB (2024); IIA (2024)

2622-6421
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056

Populasi penelitian mencakup aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi: (1) menjabat sebagai Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), atau Bendahara Pengeluaran; dan (2) memiliki masa kerja minimal satu tahun pada bidang atau fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Kriteria tersebut ditetapkan agar responden memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai penerapan aturan akuntansi, pengawasan internal, serta proses pengelolaan keuangan pada OPD.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 31 organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi unit penelitian. Penetapan tiga responden pada setiap OPD didasarkan pada tiga jabatan yang mewakili fungsi utama dalam pengelolaan keuangan OPD, yaitu Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mewakili fungsi penggunaan anggaran, PPK-SKPD yang mewakili fungsi penatausahaan keuangan, dan Bendahara Pengeluaran yang mewakili fungsi kebendaharaan pengeluaran. Penggunaan komposisi responden yang sama pada setiap OPD juga dimaksudkan untuk memberikan keterwakilan yang seimbang antar-OPD. Dengan demikian, setiap OPD diwakili oleh tiga responden yang memenuhi kriteria penelitian sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 93 responden (31 OPD × 3 responden).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan melalui evaluasi *measurement model* untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, dilanjutkan dengan evaluasi *structural model* untuk menguji hubungan antarvariabel. Pengujian efek moderasi dilakukan untuk menganalisis peran audit internal dalam memoderasi pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *public financial governance*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Identitas Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	60	64,52
	Perempuan	33	35,48
Usia	Kurang dari 25 tahun	3	3,23
	25–35 tahun	15	16,13
	36–45 tahun	33	35,48
	Lebih dari 46 tahun	42	45,16
Masa Kerja	Kurang dari 5 tahun	6	6,45
	5–10 tahun	27	29,03
	Lebih dari 10 tahun	60	64,52
Pendidikan Terakhir	Diploma	6	6,45
	Sarjana (S1)	54	58,06
	Magister (S2)	32	34,41
	Doktor (S3)	1	1,08
Jumlah		93	100,00

Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 60 orang (64,52%), sedangkan perempuan sebanyak 33 orang (35,48%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berusia lebih dari 46 tahun sebanyak 42 orang (45,16%), diikuti kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 33 orang (35,48%), kelompok usia 25–35 tahun sebanyak 15 orang (16,13%), dan kelompok usia kurang dari 25 tahun sebanyak 3 orang (3,23%).

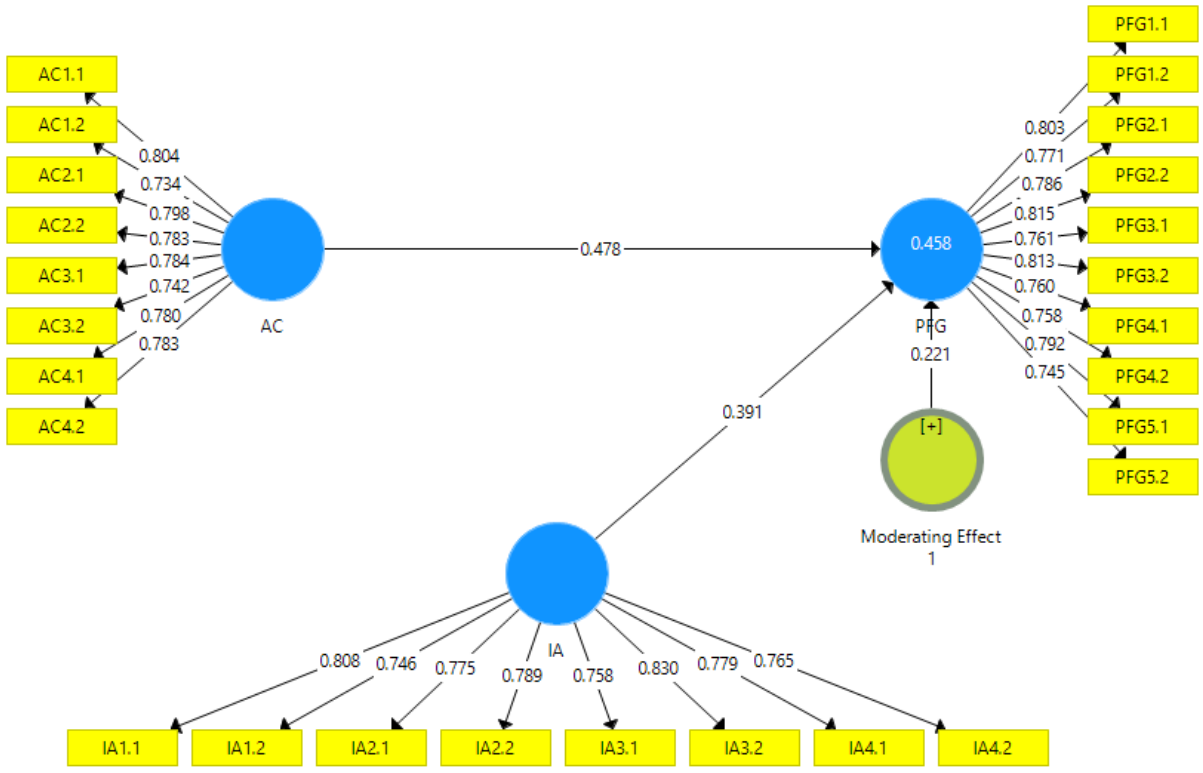
Berdasarkan masa kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 60 orang (64,52%). Responden dengan masa kerja 5–10 tahun berjumlah 27 orang (29,03%), sedangkan responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 6 orang (6,45%). Ditinjau dari

2622-6421
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056

pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 54 orang (58,06%), diikuti Magister (S2) sebanyak 32 orang (34,41%), Diploma sebanyak 6 orang (6,45%), dan Doktor (S3) sebanyak 1 orang (1,08%). Profil karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian secara umum didominasi oleh aparatur dengan masa kerja yang relatif panjang dan latar belakang pendidikan tinggi, sehingga memiliki pengalaman yang relevan dalam memahami proses pengelolaan keuangan pada OPD.

4.2. *Outer Model Evaluation*

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk yang digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi validitas konvergen dilakukan dengan memperhatikan nilai *outer loading* pada masing-masing indikator terhadap konstruk yang diukur. Nilai *outer loading* yang memenuhi kriteria menunjukkan bahwa indikator memiliki kemampuan yang memadai dalam merepresentasikan konstruk penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 1. *PLS-SEM Outer Model Evaluation Results*

Nilai *outer loading* masing-masing indikator berada di atas batas minimum 0,70, dengan rentang nilai antara 0,734 hingga 0,830. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruk laten yang diukur secara memadai. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang direpresentasikannya. Dengan demikian, tidak terdapat indikator yang perlu dieliminasi pada tahap evaluasi *outer loading* dan seluruh indikator dapat dipertahankan untuk analisis selanjutnya.

2622-6421
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056

Tabel 3. *Construct Reliability and Validity*

Variable	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability*	*AVE*
Accounting Compliance	0,906	0,924	0,603
Internal Audit	0,909	0,926	0,611
Public Financial Governance	0,929	0,940	0,609

Uji reliabilitas konstruk juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel *Accounting Compliance* sebesar 0,906, Internal Audit sebesar 0,909, dan *Public Financial Governance* sebesar 0,929. Seluruh nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,70, yang menunjukkan konsistensi internal yang tinggi. Hasil ini diperkuat oleh nilai *Composite Reliability* yang berada pada rentang 0,924 hingga 0,940, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Validitas konvergen juga dikonfirmasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50, yaitu sebesar 0,603 untuk *Accounting Compliance*, 0,611 untuk Internal Audit, dan 0,609 untuk *Public Financial Governance*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten masing-masing, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen.

Tabel 4. *Fornell–Larcker Criterion*

Variable	*Accounting Compliance*	*Internal Audit*	*Public Financial Governance*
Accounting Compliance	**0,776**		
Internal Audit	0,633	**0,782**	
Public Financial Governance	0,558	0,545	**0,781**

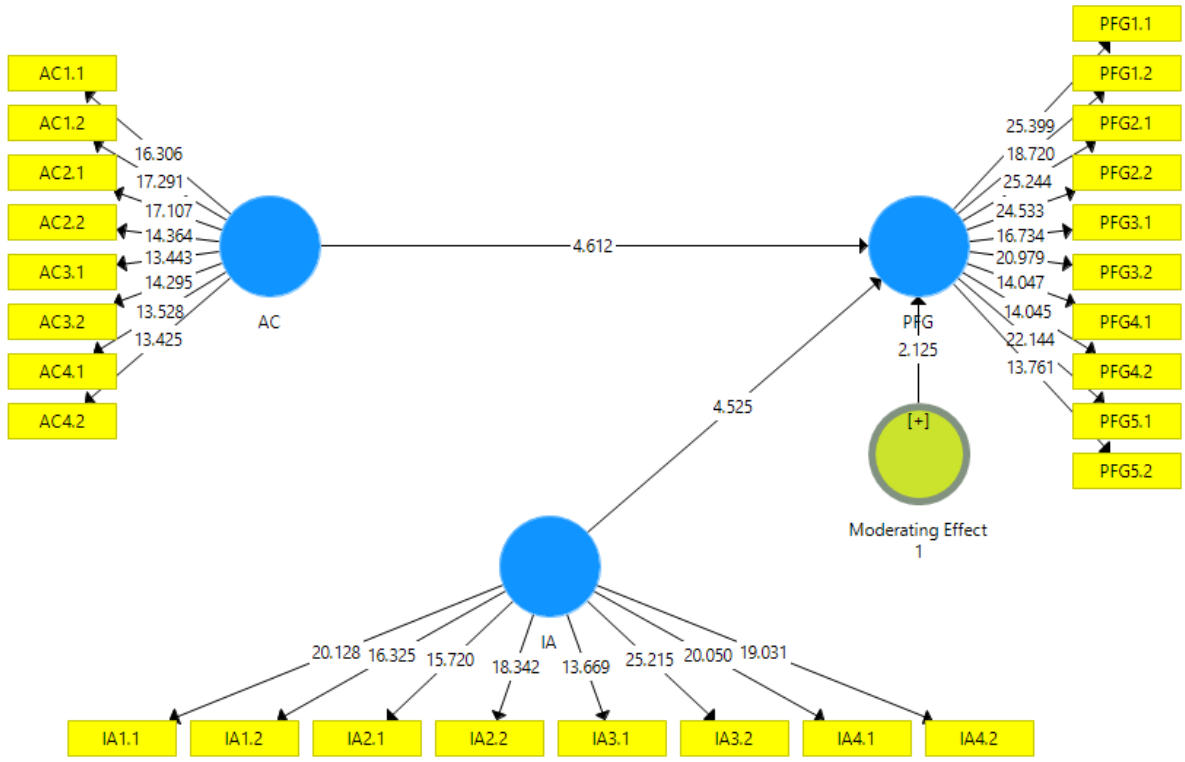
Selanjutnya, validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell–Larcker. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat perbedaan yang memadai dan tidak terjadi masalah tumpang tindih pengukuran. Hasil tersebut diperkuat oleh nilai HTMT yang berada di bawah batas konservatif 0,90, sehingga semakin menegaskan terpenuhinya validitas diskriminan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan. Dengan demikian, model pengukuran dinyatakan layak dan analisis dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi model struktural (inner model).

4.3. *Inner Model Analysis*

Pengujian *inner model* dilakukan dengan memperhatikan nilai *R-square* (R^2) dan *path coefficient*. Nilai *R-square* digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel endogen. Semakin tinggi nilai *R-square*, maka semakin baik kemampuan prediktif model yang dibangun. *R-square* menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen beserta variabel interaksi dalam model struktural.

2622-6421
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)
Volume 16, No 02, Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.55601/jwem.v16i02.2056



Gambar 2. *PLS-SEM Inner Model Analysis Results*

Berdasarkan hasil pengujian *inner model*, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-square*) pada variabel *Public Financial Governance* sebesar 0,458. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 45,8% variasi *Public Financial Governance* dapat dijelaskan oleh *Accounting Compliance*, *Internal Audit*, serta efek moderasi dalam model penelitian, sedangkan 54,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai *R-square* tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan variasi *Public Financial Governance*.

Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa *Accounting Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Financial Governance* dengan nilai koefisien sebesar 0,478, nilai t-statistic sebesar 4,612, dan p-value sebesar 0,000 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi, maka semakin baik tata kelola keuangan publik yang dihasilkan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Accounting Compliance berpengaruh terhadap *Public Financial Governance* dapat diterima.

Selanjutnya, Internal Audit juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Financial Governance* dengan nilai koefisien sebesar 0,391, t-statistic sebesar 4,525, dan *p-value* sebesar 0,000 (< 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa peran audit internal yang efektif mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik pada pemerintah daerah.

Pengujian efek moderasi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara *Accounting Compliance* dan Internal Audit memiliki koefisien sebesar 0,221 dengan nilai t-statistic sebesar 2,125 dan p-value sebesar 0,034 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Internal Audit secara signifikan memoderasi hubungan antara *Accounting Compliance* dan *Public financial governance*. Koefisien yang bernilai positif mengindikasikan bahwa keberadaan audit internal memperkuat pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap tata kelola keuangan publik. Dengan kata lain, semakin efektif fungsi audit internal, maka semakin kuat kontribusi kepatuhan akuntansi dalam meningkatkan kualitas *public financial governance.*

4.4. Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *Accounting Compliance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Financial Governance*. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar dan regulasi akuntansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen substantif dalam membangun tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Secara konseptual, temuan ini menguatkan pandangan bahwa *public financial governance* bertumpu pada kualitas kepatuhan terhadap kerangka regulasi formal yang mengatur proses perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan (Adekoya, 2023; Barngetuny, 2024).

Kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik mendorong tersedianya informasi keuangan yang andal dan dapat diverifikasi, sehingga memperkuat akuntabilitas institusional sebagaimana ditegaskan oleh Amalia (2023). Hasil ini juga selaras dengan Dimitrov (2024) dan Muslimah et al. (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan akuntansi yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks pemerintah daerah, kepatuhan akuntansi merupakan determinan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan publik.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa *Internal Audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Financial Governance*. Temuan ini mempertegas posisi audit internal sebagai mekanisme pengawasan strategis yang menjembatani antara regulasi formal dan implementasi operasional. Audit internal berfungsi sebagai alat evaluatif sekaligus sebagai instrumen peningkatan kualitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi (Nadirsyah et al., 2024; Shuwaili et al., 2023). Sejalan dengan Su et al. 2023) dan Gyimah et al. (2024), efektivitas audit internal dapat memperkuat integritas pengelolaan keuangan publik dan mengurangi risiko penyimpangan. Temuan ini juga didukung oleh Appiah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas audit internal pada sektor publik berkaitan dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, dengan independensi auditor internal, kompetensi staf audit, dan dukungan manajemen sebagai faktor penting yang mendukung efektivitas fungsi tersebut.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan mengenai peran moderasi *Internal Audit* dalam hubungan antara *Accounting Compliance* dan *Public Financial Governance*. Koefisien interaksi yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa audit internal memperkuat pengaruh kepatuhan akuntansi terhadap tata kelola keuangan publik. Artinya, kepatuhan terhadap aturan akuntansi akan menghasilkan dampak yang lebih optimal ketika didukung oleh fungsi audit internal yang independen, kompeten, dan efektif.

Temuan ini memberikan pengayaan terhadap literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam tata kelola sektor publik (Oppong et al., 2023; Zouari-Hadiji & Mroua, 2026). Berbeda dari studi terdahulu yang umumnya menguji pengaruh langsung masing-masing variabel, penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran strategis sebagai *strengthening mechanism* yang memperkuat efektivitas kepatuhan regulatif. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi hubungan langsung sekaligus menawarkan perspektif integratif mengenai sinergi antara kepatuhan akuntansi dan fungsi pengawasan internal dalam membangun *public financial governance*.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,458 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 45,8% variasi *Public Financial Governance*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *Accounting Compliance*, *Internal Audit*, dan efek moderasi dalam model memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan variasi *Public Financial Governance*. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang lebih luas (Sari & Darmastuti, 2023; Uyar et al., 2022). Hal ini membuka ruang bagi pengembangan penelitian selanjutnya untuk mengintegrasikan variabel kelembagaan dan perilaku organisasi dalam model tata kelola keuangan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *public financial governance* pada pemerintah daerah tidak dapat dicapai hanya melalui pengetatan regulasi akuntansi. Diperlukan integrasi antara kepatuhan regulatif yang substantif dan fungsi audit internal yang efektif sebagai mekanisme penguatan. Dengan menempatkan audit internal sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan kontribusi

teoretis berupa model konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan determinan tata kelola keuangan publik, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal secara strategis dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa *accounting compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *public financial governance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar dan prosedur akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, *internal audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *public financial governance* serta terbukti memperkuat pengaruh *accounting compliance* terhadap *public financial governance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi audit internal memiliki peran dalam memastikan penerapan aturan akuntansi dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai.

Implikasi praktis penelitian ini mengarah pada penguatan aspek kepatuhan akuntansi dan kapasitas audit internal pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada dimensi *internal audit*, penguatan kompetensi dan profesionalisme auditor internal dapat dilakukan melalui pemetaan kompetensi secara berkala, peningkatan pendidikan dan pelatihan profesional, pengembangan kompetensi audit berbasis risiko dan pemeriksaan kepatuhan, serta peningkatan sertifikasi profesi sesuai dengan kebutuhan fungsi pengawasan. Pengembangan kompetensi tersebut terutama diperlukan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan, menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan dokumen pendukung, serta mengidentifikasi potensi kelebihan pembayaran dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Penguatan pada aspek tersebut relevan dengan temuan pemeriksaan kepatuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan, kelebihan pembayaran, serta belum optimalnya pemenuhan kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor internal dapat diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan preventif dan deteksi dini terhadap risiko ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada dimensi *accounting compliance*, penguatan dapat dilakukan melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan menerapkan kalender pelaporan keuangan yang terintegrasi pada setiap OPD, penetapan batas waktu internal sebelum tenggat pelaporan resmi, serta pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan secara berkala. Mekanisme pemantauan juga perlu diterapkan untuk mengidentifikasi OPD yang mengalami keterlambatan penyampaian dokumen dan pertanggungjawaban keuangan sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum berakhirnya periode pelaporan. Dalam pelaksanaannya, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran dapat memperkuat verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen secara periodik untuk meminimalkan keterlambatan maupun ketidaksesuaian pada tahap penyusunan laporan keuangan. Upaya tersebut dapat memperkuat kepatuhan pada tahapan penatausahaan dan pertanggungjawaban serta meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan *public financial governance* pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan perlu diarahkan pada kepatuhan terhadap aturan akuntansi yang disertai dengan pelaksanaan audit internal yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi auditor, memperkuat pengawasan terhadap potensi ketidakpatuhan, menjaga ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta memastikan rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Upaya tersebut sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

6. KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan wilayah yang terbatas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasikan pada daerah lain. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,458 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 45,8% variasi *Public Financial Governance*, sedangkan 54,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hal ini menunjukkan masih terdapat variabel lain yang dapat dipertimbangkan dalam menjelaskan *Public Financial Governance*. Penggunaan data yang juga sepenuhnya bersumber dari kuesioner juga berpotensi menimbulkan bias subjektivitas responden.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian melalui studi komparatif lintas pemerintah daerah guna meningkatkan daya generalisasi temuan. Selain itu, model penelitian mendatang perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan variabel kelembagaan dan perilaku organisasi lain, seperti kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, serta efektivitas sistem informasi pengendalian. Terakhir, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) melalui wawancara mendalam juga sangat dianjurkan untuk menggali dinamika hambatan riil pengawasan internal di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adekoya, A. A. (2023). Public Financial Management in Nigeria: The Goals, Concepts, Legal and Institutional Framework, and Reforms for Good Governance. *International Journal Of Management And Economics Invention*, *9*(5), 2935–2946. https://doi.org/10.47191/ijmei/v9i5.01

Adekunle, B., Chukwuma-Eke, E., Balogun, E., & Ogunsola, K. (2023). Developing a Digital Operations Dashboard for Real-Time Financial Compliance Monitoring in Multinational Corporations. *International Journal of Scientific Research in Computer Science Engineering and Information Technology*, *9*, 728–746.

Al-Taee, S. H. H., & Al-Fandawi, H. H. F. (2023). Impact of the electronic internal auditing based on IT governance to reduce auditing risk. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, *7*(1), 94.

Amalia, M. M. (2023). Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. *The Es Accounting And Finance*, *1*(03), 160–168. https://doi.org/10.58812/esaf.v1i03.105

Appiah, M., Amaning, N., Tettevi, P., Owusu, D., & Ware, E. (2023). Internal audit effectiveness as a boon to public procurement performance: A multi mediation model. *Cogent Economics & Finance*, *11*. https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2164968

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024*. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2026/02/ihps_ii_2024_1762309845_compressed_11zon.pdf

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastrukturr Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok* (Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan 23/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.03/02/2026). BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Barngetuny, J. (2024). Examining the Impact of Financial Governance Frameworks on Efficiency and Accountability in Public Institutions in Kenya. *International Journal of Education and Management Studies*, *14*(4), 364–374.

Batkunde, A. A., & Dewi, P. M. (2022). Pengaruh Moralitas Individu Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Ambon. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *6*(3), 2819–2829. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.917

Dimitrov, K. (2024). Improving Compliance and Transparency in Financial Reporting: Strategies for Promoting Accountability and Integrity in Corporate Practices. *Сборник Доклади От Научна Конференция „Знание, Наука, Иновации, Технологии”*, *1*(4), 364–376.

Efunniyi, C., Abhulimen, A., Obiki-Osafiele, A., Osundare, O., Agu, E., & Adeniran, I. (2024). Strengthening corporate governance and financial compliance: Enhancing accountability and transparency. *Finance & Accounting Research Journal*, *6*, 1597–1616. https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1509

Gonçalves, F. J. A., De Moura, A. A. F., & Motoki, F. Y. S. (2022). What influences the implementation of IFRS for SMEs? The Brazilian case. *Accounting & Finance*, *62*(2), 2947–2992. https://doi.org/10.1111/acfi.12917

Gyimah, A. G., Addai, B., & Tetteh, D. D. (2024). Impact of internal control systems on financial irregularities in local governments: Insights from the developing world. *Journal on Innovation and Sustainability RISUS*, *15*(2), 16–32. https://doi.org/10.23925/2179-3565.2024v15i2p16-32

International Federation of Accountants (IFAC). (2023). *Greater Transparency and Accountability in the Public Sector | IFAC*. International Federation of Accountants. https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector

International Organisation of Supreme Audit Institutions. (2019). *Fundamental Principles of Public-Sector Auditing* (International Standards of Supreme Audit Institutions ISSAI 100). International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_100/ISSAI_100_EN.pdf

International Public Sector Accounting Pronouncements. (2024). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (IPSASB)*. https://www.ipsasb.org/publications/2024-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements

Kabwe, M. (2023). Effect of International Financial Reporting Standards Compliance on Financial Reporting Quality: Evidence from a Developing Country. *International Journal of Finance and Accounting*, *8*(1), 36–57. https://doi.org/10.47604/ijfa.1802

Mendez, C., & Bachtler, J. (2024). The quality of government and administrative performance: Explaining Cohesion Policy compliance, absorption and achievements across EU regions. *Regional Studies*, *58*(4), 690–703. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2083593

Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Reda, R. I., & As'adi, A. (2023). Pengaruh Audit Laporan Keuangan, Penerapan Good Governance, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, *6*(2), 12–20.

Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli, R. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *18*, 1–15. https://doi.org/10.37301/jkaa.v18i1.99

Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: The key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 2382389. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389

Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *3*, 259–269. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529

OECD. (2023). *Public Financial Management in Peru: An OECD Peer Review*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/d51d43b1-en

OECD. (2024). *Anti-Corruption and Integrity Outlook 2024*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/968587cd-en

Oppong, C., Atchulo, A. S., Fofack, A. D., & Afonope, D. E. (2023). Internal control mechanisms and financial performance of Ghanaian banks: The moderating role of corporate governance. *African Journal of Economic and Management Studies*, *15*(1), 88–103. https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2023-0101

Pattawe, A., Abdullah, M. I., Karim, F., Kahar, A., Din, M., Zahra, F., Furqan, A. C., Tanra, A. A. M., & Dharma, D. M. A. (2022). Improving Regional Financial Management through Administration of Regional Property and Financial Reporting on Regional Assets. *Research Horizon*, *2*(1), 283–294. https://doi.org/10.54518/rh.2.1.2022.50

Rashied, A. S., Chyad, A. K., Qasem, W., & Abbas, N. H. (2024). The Impact of Financial Management Reforms on Budget Efficiency, Transparency, and Wastage Reduction Across Diverse Regions. *Journal of Ecohumanism*, *3*(5), 743–762. https://doi.org/10.62754/joe.v3i5.3935

Sari, D. N., & Darmastuti, D. (2023). Internal control weaknesses: Its relationship with local government characteristics and follow-up on audit results. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 108–117. https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss1.art10

Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. (2025). Evaluasi penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. *Journal of Public Policy*, *1*(1), 1–16.

Shuwaili, A. M. J., Hesarzadeh, R., & Bagherpour Velashani, M. A. (2023). Designing an internal audit effectiveness model for public sector: Qualitative and quantitative evidence from a developing country. *Journal of Facilities Management*, *22*(5), 792–810. https://doi.org/10.1108/JFM-07-2022-0077

Simon, C., Gani, P., & Shenaaz. (2024). *International Public Sector Accounting Standards: An Antidote to Corruption in Public Sector Entities in Zimbabwe African Journal of Accounting, Banking and Intellectual Capital (AJABIC)*. https://doi.org/10.31920/3050-2314/2024/v1n2a3

Su, H., Lu, Y., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). Good Governance within Public Participation and National Audit for Reducing Corruption. *Sustainability*, *15*(9), 7030. https://doi.org/10.3390/su15097030

Teresia, K., & Tirsa, S. (2023). Enhancing Financial Governance: Compliance with Government Accounting Standards in Educational Institutions. *Indonesia Auditing Research Journal*, *12*(4), 143–152.

The Institute of Internal Auditors. (2024). *Global Internal Audit Standards | The IIA*. https://www.theiia.org/en/standards/2024-standards/global-internal-audit-standards/

Uyar, A., Karmani, M., Kuzey, C., Kilic, M., & Yaacoub, C. (2022). Does Governance Quality Explain the Sustainability Reporting Tendency of the Public Sector? Worldwide Evidence. *International Journal of Public Administration*, *45*(13), 931–947. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1900243

Yasis, U. (2024). Influence of Government Accounting Standards, Systems Internal Control, Regulatory Compliance Legislation on Quality Financial Statements. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, *6*(1), 235–254. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1008

Yousif, N., & Mohamed, S. A. (2022). The Role of Internal Audit in Assessing the Risks of Management Decisions Regarding Strategic Operations (Acquisition). *Journal of Economics and Administrative Sciences*, *28*(133), 172–186. https://doi.org/10.33095/jeas.v28i133.2362

Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, *13*(1), 19. https://doi.org/10.3390/admsci13010019

Zouari-Hadiji, R., & Mroua, W. (2026). Audit and financial communication quality: The moderating role of internal governance mechanisms. *EuroMed Journal of Business*, *21*(2), 551–588. https://doi.org/10.1108/EMJB-09-2024-0238